



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20046 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2a Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 28 Tahun 2013 tentang Peraturan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah kabupaten Buton;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2013 – 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

1. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

**Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 6 Mei 2014**

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TANGGAL : 6 MEI 2014

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka partisipasi kasar SD/MI/paket A (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka partisipasi kasar SM/MTs/paket B (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/paket B (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/paket C (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Angka partisipasi sekolah SMA/MA/SMK (%)	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga	Prestasi di POR-Prov	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
	Keikutsertaan dalam even kepemudaan baik tingkat propinsi maupun nasional	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	Badan Komunikasi, Informatika, PDE, Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Rasio tempat ibadah (Mesjid)	Sekretariat Daerah
	Rasio tempat ibadah (Gereja)	Sekretariat Daerah
	Rasio tempat ibadah (Pura)	Sekretariat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1000 KH)	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian bayi (AKB/1.000 KH)	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian balita (AKABA/1.000 KH)	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 KH)	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH	Dinas Kesehatan
	Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita	Dinas Kesehatan
	Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan
	Menurunnya prevalensi, angka kesakitan, angka kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Prevalensi TBC (per 100.000 penduduk)	Dinas Kesehatan
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
	Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai standar	Dinas Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan UCI **	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare **	Dinas Kesehatan
Angka penemuan kasus baru Frambusia per 10.000 penduduk	Dinas Kesehatan	
Cakupan pengobatan kasus Frambusia	Dinas Kesehatan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Menurunnya jumlah masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah anak terlantar yang dibina	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase konflik sosial yang ditangani (%)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Transmigran swakarsa	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase transmigrasi umum yang berhasil	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dan kesetaraan gender	Berkurangnya jumlah perkawinan dengan istri dibawah 16 tahun per tahun hingga 970 orang pada tahun 2017	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Jumlah Ibu (dalam keluarga) yang Tidak Usaha per Tahun	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Berkurangnya jumlah kekerasan terhadap perempuan per tahun	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
	Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Persentase perempuan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Buton	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya kualitas hidup anak	Jumlah kegiatan pemasyarakatan hak anak per tahun	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Berkurangnya jumlah kekerasan terhadap anak per tahun	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Jumlah persentase anak (<1 tahun) diimunisasi per tahun	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya SDM melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	Prevalensi peserta KB aktif	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Berkurangnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
	Jembatan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang jalan kota/jumlah penduduk	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase /saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Dinas Pekerjaan Umum
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pemenuhan data dan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya Perda RTRW	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Tersedianya dokumen RDTR	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Tersedianya dokumen RTBL	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Ketaatan terhadap RTRW	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang <i>up to date</i>	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD	Bappeda
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD	Bappeda
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD	Bappeda
	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Bappeda
	Jumlah dokumen hasil litbang bidang pemerintahan, politik, ekososbud, keu dan SDA	Balitbang.
	Meningkatnya sarana prasarana pertanian	Rasio panjang irigasi dalam kondisi baik
Luas irigasi dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum
Cakupan pelayanan irigasi yang teraliri sawah		Dinas Pekerjaan Umum
Rumah tangga pengguna air bersih		Dinas Pekerjaan Umum
Persentase rumah tangga bersanitasi		Dinas Pekerjaan Umum
Persentase rumah layak huni		Dinas Pekerjaan Umum
Persentase rumah tangga mendapat aliran listrik		Dinas Pertambangan dan Energi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan	Persentase kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan	Dinas Perhubungan
	Jumlah uji KIR Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
	Persentase kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan	Dinas Perhubungan
	- Guardrail	Dinas Perhubungan
	- Rambu perintah Tabel IIB	Dinas Perhubungan
	- Rambu peringatan Tabel 1	Dinas Perhubungan
	- Rambu larangan Tabel IIA	Dinas Perhubungan
	- Rambu petunjuk Tabel III	Dinas Perhubungan
	- Deliniator	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan kebutuhan terminal Type B yang representatif	Dinas Perhubungan
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Dinas Perhubungan
	Rasio ijin trayek	Dinas Perhubungan
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang baik	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase ruang terbuka hijau yang fungsional	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan penanganan persampahan	Persentase penanganan sampah	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
	Tempat pembuangan sampah (TPS) / 1000 penduduk	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Meningkatnya pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran	BPBD
	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	BPBD
	Prosentase penanganan bencana alam	BPBD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pengelolaan potensi SDA secara lestari	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Dinas Kehutanan
	Berkurangnya Lahan Kritis	Dinas Kehutanan
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Dinas Kehutanan
	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Badan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kelautan dan Perikanan	Konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (juta rupiah)	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi aktif	Dinas Koperasi dan UKM
	Usaha mikro dan kecil	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase peningkatan SHU (%)	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase UMKM yang dibina (%)	Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya ton per hektar	Dinas Pertanian
	Ketersediaan pangan utama	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
	Produksi daging ternak	Dinas Pertanian
	Produksi Peternakan (Ekor/Tahun)	Dinas Pertanian
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Dinas Pertanian
	Tersedianya regulasi tentang ketahanan pangan	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pengelolaan Potensi Mineral dan Air	Pertambangan tanpa ijin	Dinas Pertambangan dan Energi
	Jumlah ijin usaha yang dikeluarkan sesuai standar	Dinas Pertambangan dan Energi
	Meningkatnya produksi pertambangan (Aspal)	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya pengembangan dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik serta pembangkit tenaga listrik alternatif	Rasio desa berlistrik	Dinas Pertambangan dan Energi
	Rasio elektrifikasi	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya industri perdagangan usaha industri kreatif	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	Dinas Industri dan Perdagangan
	Persentase IKM produktif	Dinas Industri dan Perdagangan
	Persentase jumlah IKM yang dibina	Dinas Industri dan Perdagangan
Meningkatnya jumlah investasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA/ PMDN (milyar rupiah)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Meningkatnya Kepariwisataaan Daerah	Kunjungan wisatawan	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
	Persentase promosi budaya Untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Kebudayaan dan pariwisata

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah lembaga adat yang berperan dalam pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
	Persentase LPM berprestasi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
	Persentase PKK aktif	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Meningkatnya poleksosbud kamtibmas perlindungan serta kedisiplinan masyarakat	Rasio bangunan Ber-IMB	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase pengendalian tuntutan masyarakat melalui unjuk rasa	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Rasio Linmas terlatih per 10.000 penduduk	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Rasio pos siskamling per jumlah Desa/Kel	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu/ pilkada	Badan Kesbang dan Politik
Terwujudnya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan	BKDD
	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya (kompetensinya)	BKDD
	Persentase pegawai sesuai kompetensi jabatan	BKDD
	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai	BKDD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKD
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	BPKD
	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah	BPKD
	Rasio efisiensi belanja	BPKD
	Meningkatnya PAD	Dispenda
	Peningkatan proporsi PAD dibandingkan Total Pendapatan	Dispenda

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pelayanan pemerintahan daerah	Luas lahan bersertifikat	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian kasus tanah Negara	Sekretariat Daerah
	Kepemilikan KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase masyarakat yang memiliki kartu keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kepemilikan akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemenuhan Produk Hukum Daerah secara sistematis dan terencana sesuai kebutuhan daerah	Persentase Raperda yang menjadi Perda	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Bupati yang diterbitkan	Sekretariat Daerah
	Persentase Penerbitan SK Bupati	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum	Sekretariat Daerah
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian Meningkatnya kualitas data dan informasi	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP	Inspektorat
	Rasio SKPD yang akses ke jaringan internet	Badan Komunikasi, Informatika, PDE, Arsip dan Perpustakaan
	Rasio kecamatan yang akses ke jaringan internet	Badan Komunikasi, Informatika, PDE, Arsip dan Perpustakaan
	Website milik pemerintah daerah	Sekretariat Daerah
	Jumlah pameran/expo	Sekretariat Daerah
Meningkatnya perencanaan pembangunan partisipatif	Persentase aparat Bappeda yang mengikuti pelatihan perencanaan	Bappeda

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN